

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MASYARAKAT GUNUNG KEMUKUS KABUPATEN SRAGEN MELALUI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Agus Triyono¹⁾, Dian Purworini²⁾, Marendra Murti P³⁾

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta

agus.triyono@ums.ac.id, dian.purworini@ums.ac.id, rendramp88@gmail.com

Abstract

Mount kemukus is a tourist area that before closing, November 27, 2014 is very popular with the life of prostitution alleged religious tourism. Not only local citizens but also people outside the area many of which depend on the business of their life of prostitution. Post closure of prostitution, people's lives change. The loss of jobs, decrease in revenues, a drop in the number of visitors and so on. To address the problem, the Government is conducting a communications program development-oriented community empowerment. With qualitative research methods, data collecting techniques in the form of interviews, observation and documentation and analysis techniques using interactive analysis, this study tried to identify the empowerment program undertaken by the Government. Results demonstrating the researchers that the Government basically Sragen District have been doing community empowerment activities are expected to improve the quality of economic, health or education. However, some development policy that is top down got less appreciation from the public. So that in future the Government should evaluate and formulate policy strategies of empowerment are more appropriate.

Key word : *Mount Kemukus, development communication, empowerment*

A. Pendahuluan

Paradigma baru pembangunan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat masyarakat. Jika pada masa awal mereka hanya berperan sebagai obyek, kini dalam pandangan baru masyarakat dianggap sebagai subyek pembangunan yang diharapkan mampu menentukan perbaikan kualitas hidupnya. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah, akan tetapi mereka juga akan dilibatkan dalam perumusan, pelaksanaan serta evaluasi dari kebijakan tersebut.

Pada dasarnya, esensi utama kawasan wisata religi di Gunung Kemukus adalah ziarah ke makam Pangeran Samodro, yakni dengan mengingat jasa-jasa dan keluhuran jiwa dan mendoakan beliau yang dimakamkan di tempat tersebut sesuai dengan ajaran agama/kepercayaannya. Hal ini diharapkan agar para peziarah dapat mengambil hikmah dan keutamaan dari nilai-nilai kejuangan dari tokoh yang dimakamkan di Gunung Kemukus tersebut. Namun demikian, hak yang jauh lebih

penting dari memahami dan meneladani nilai kejuangan yang pantang menyerah dalam menghadapi halangan maupun rintangan, baik fisik maupun mental. Diharapkan orang yang berziarah akan meneladani dan memiliki ketabahan serta keluhuran jiwa seperti Pangeran Samodro. Bagi masyarakat awam, hal ini sering disebut dengan “*nglalap berkah*”.

Namun demikian, tidak jelas siapa yang memulai munculnya mitos di masyarakat bahwa apabila seseorang mempunyai hajat dan ingin terkabul hajatnya, maka ia harus melakukan hubungan seksual di lokasi Gunung Kemukus tersebut dengan lawan jenisnya yang bukan suami atau istrinya selama tujuh kali berturut turut tanpa putus secara tetap. Berkembangnya kepercayaan yang demikian memicu pesatnya bisnis prostitusi di kawasan tersebut, meskipun pada sebenarnya tidak ada “ajaran” yang mengharuskan “ritual seks” kepada para peziarah.

Meningkatnya kunjungan orang luar dengan berbagai macam orientasi, membuat kehidupan ekonomi di kawasan tersebut mulai

menggeliat. Alhasil, terlepas dari adanya kontroversi, lapangan pekerjaan pun mulai bermunculan dan tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui bisnis prostitusi tersebut. Sebagian dari warga berprofesi sebagai penjual makanan/minuman, menyewakan tempat maupun sebagai tukang ojek di kawasan tersebut. Untuk mereka yang berasal dari luar, biasanya mereka bekerja sebagai pemandu karaoke dan tidak sedikit dari mereka ada yang menjadi pekerja seks komersial.

Berkembangnya “wisata seksual” yang sedemikian pesat membuat pemerintah resah, terlebih lagi adanya laporan dari salah seorang wartawan luar negeri yang membuat liputan di kawasan tersebut. Akhirnya, masalah ini bukan lagi menjadi komoditi lokal, namun juga nasional dan bahkan internasional. Terkuaknya bisnis prostitusi ini membuat Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Sragen mengambil tindakan dengan menutup kegiatan di Gunung Kemukus yang tidak ada hubungannya dengan ziarah, yakni menutup segala bentuk prostitusi dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan seksual.

Penutupan kegiatan prostitusi tersebut dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2014 bersamaan dengan penertiban, sosialisasi, dan pendataan penghuni dan pekerja seks komersial yang berada di lokasi tersebut. Selain itu juga dilakukan penutupan kegiatan karaoke dan persewaan kamar-kamar penginapan yang tidak berizin, serta memulangkan penghuni tak berizin (tidak mempunyai KTP lokal wilayah).

Tentunya penutupan tersebut bukan tidak berimbas sama sekali. Seperti yang dilansir harian *Joglosemar*, akibat ditutupnya bisnis prostitusi tersebut, terjadi penurunan yang signifikan dari sisi jumlah pengunjung, jumlah pendapatan, serta lumpuhnya perekonomian warga sekitar yang sudah lama menggantungkan dirinya pada bisnis prostitusi. Hal ini nampak dari terhentinya 233 pelaku usaha lain seperti penyeberangan, ojek, laundry, warung makan, parkir, dan asongan yang selama ini menggantungkan pendapatan dari pengunjung Kemukus.

Hasil *eliminary research* peneliti menunjukkan bahwa, sejak penutupan

penginapan dan karaoke, jumlah pengunjung turun hampir 50 persen. Hal ini dikarenakan pada malam Jumat Pon yang biasanya pengunjung bisa lebih dari 2.000 orang, sekarang hanya sekitar 1.000 pengunjung saja. Begitu pula pendapatan retribusi, yang rata-rata per bulannya bisa mencapai Rp 18 juta, Januari 2015 kemarin hanya mampu mencapai Rp 13,5 juta.

Dengan ditertibkannya bisnis prostitusi tersebut, pada akhirnya masyarakat kembali kepada mata pencaharian yang telah ditekuni secara turun temurun, yaitu bertani, berladang bagi yang mempunyai lahan, sedangkan yang tidak mempunyai lahan garapan, mereka menjadi buruh garap tani. Dari sisi penghasilan yang didapat, bekerja dalam konteks pasca penutupan tentunya sangat berbeda dibandingkan sebelum penutupan, lebih-lebih jumlah pengunjung pun juga mengalami penurunan hampir 50%. Namun demikian, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat harus tetap berjalan.

Melihat tingginya dampak sosial akibat penutup bisnis tersebut, pada naskah kali ini, penulis tertarik untuk mengkaji usaha apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak namun bisnis prostitusi tidak muncul lagi? Bagaimanakah kebijakan komunikasi pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat Pemkab Sragen dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar Gunung Kemukus?

B. Penelitian terdahulu

1. Muhammad Ali M, 2014

Ali meneliti tentang pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata yang dikelola oleh Paguyuban Kampung Rawa di daerah Rawa Pening, Jawa Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian tersebut menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelola Paguyuban melakukan inovasi dengan melibatkan masyarakat disekitar rawa yang tergabung dalam paguyuban sehingga masyarakat ikut berperan dalam proses pembangunan.

Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan mata pencaharian mereka sebelumnya, pasalnya mereka masih diberikan waktu untuk mengurus sawah maupun tambak mereka, sehingga secara ekonomi masyarakat yang tergabung mendapatkan keuntungan tambahan dari ia bekerja di Kampong Rawa. Disamping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program komunikasi pembangunan didasarkan atas beberapa aspek diantaranya : penyebaran informasi dan keuntungan sosial, partisipasi masyarakat, kemandirian, dan modernisasi.

2. Ika Kusuma Permanasari, 2011

Wilayah Indonesia sebagian besar adalah perdesaan dengan mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, jumlah penduduk miskin terbesar juga terdapat di perdesaan. Beberapa Negara dewasa ini telah mengembangkan kepariwisataan sampai ke desa-desa dengan memajukan potensi lokal. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata.

Salah satu yang juga dapat menjadi daya tarik adalah desa tradisional yang dikembangkan menjadi desa wisata. Kecamatan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah terdapat Candi Borobudur yang menjadi salah satu warisan budaya dunia. Upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa sekitarnya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Diharapkan pemberdayaan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Fitri Novika Widjaja, 2009

Tujuan penelitian ini adalah menggali potensi sosial budaya sebagai objek wisata budaya di situs Trowulan Kabupaten Mojokerto dan melihat model-model pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam upaya pengembangan pariwisata budaya di situs trowulan. Melalui observasi dan wawancara kepada Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata dan masyarakat di tiga desa sebagai sampel penelitian (Desa Bejjong, Jati Pasar, dan Trowulan) diperoleh informasi bahwa cukup banyak obyek wisata yang ada di Situs Trowulan Kabupaten Mojokerto yang dapat dikembangkan dan untuk menunjang pengembangan pariwisata budaya tersebut dibutuhkan pemberdayaan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Dalam bidang ekonomi konsep pemberdayaan masyarakat pada awalnya diterapkan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat bidang ekonomi. Dari kondisi demikian masyarakat memerlukan permodalan, sehingga mampu mendirikan usaha-usaha di area situs trowulan dalam bentuk kios-kios, cendera mata, warung, atau rumah makan, usaha perjalanan wisata dan jasa lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan. Permodalan tersebut dapat diterima dari pihak swasta maupun pemerintah. Sementara dalam bidang pendidikan dan pelatihan konsep pemberdayaan khusus dilaksanakan untuk memberikan kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan asing maupun domestik. Masyarakat harus mampu merubah dirinya menjadi masyarakat pariwisata. Tentunya pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan terus berlangsung dan merata pada setiap desa di Kabupaten Mojokerto.

Dari beberapa penelitian tersebut, maka fokus peneliti dalam kasus Gunung Kemukus kali ini adalah bagaimanakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pasca penutupan lokalisasi di wilayah tersebut.

C. Komunikasi Pembangunan.

Komunikasi pembangunan terdiri dari dua buah suku kata yaitu komunikasi dan pembangunan. Menurut Gamble dan Gamble, komunikasi adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam mengirim sebuah pesan. Komunikasi terjadi pada tataran komunikasi interpersonal (one to one), komunikasi kelompok (one to a few), komunikasi public (one to many), komunikasi massa, dan komunikasi secara online (Gamble dan Gamble, 2005:28). Komunikasi dikenal kaya sebagai tradisi penelitian dan diadaptasikan kepada Dunia ketiga untuk mengembangkan kebutuhan, bagaimana mengembangkan penelitian komunikasi untuk memecahkan permasalahan tersendiri, dan menghasilkan produk penemuan, sehingga penelitian komunikasi memiliki kontribusi dalam pengembangan komunikasi pembangunan (Melkote dalam Harun dan Ardianto, 2011:18).

Jadi, komunikasi merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan tentang sebuah interaksi dan penyampaian sebuah pesan kepada khalayak melalui berbagai media, yang menimbulkan sebuah efek dan kemudian menghasilkan feedback. Dengan adanya komunikasi akan memudahkan kita sebagai individu ataupun kelompok untuk berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dan tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi.

Kata kedua yaitu pembangunan, mengutip Dissaynake pembangunan adalah sebuah proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan cultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri. Dalam pengertian lain pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari situasi nasional satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi dan pembangunan ini menyangkut tentang perbaikan (Harun dan Ardianto, 2011:12 dan 14).

Rogers mengartikan pembangunan sebagai proses-proses yang terjadi pada level atau

tingkatan system sosial sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun pengertian kedua istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses yang analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan (Rogers dalam Nasution, 1996:66).

Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu system sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa (Rogers dalam Harun dan Ardianto, 2011:3).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan di berbagai daerah untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat disuatu daerah tertentu. Maka dari dua konstruksitersebut yaitu komunikasi dan pembangunan maka akan terbentuk sebuah konstruksi baru yaitu komunikasi pembangunan. Melalui komunikasi sosial maka akan tercapai sebuah stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat.

Dalam arti sempit, pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan (Dilla, 2007:116).

Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara yang sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan merupakan sebuah terobosan di dalam lingkungan ilmu sosial, sebagaimana komunikasi pembangunan merupakan inovasi yang harus diusahakan agar diketahui orang dan diterima sebelum digunakan (Harun dan Ardianto, 2011:161)

D. Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

Pada prinsipnya tahapan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat dimulai dari

dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara bertahap dan strategis menyesuaikan kearifan lokal. Secara rinci masing-masing tahapan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Seleksi lokasi

Seleksi lokasi dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Pemilihan lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan Masyarakat.

Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin. Bisa saja suatu desa terlalu luas untuk menerapkan Pemberdayaan Masyarakat secara menyeluruh sehingga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan misalnya dalam salah satu dusun.

2. Tahap Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.

Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi: Pertemuan formal dengan Aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Menyepakati wilayah kerja (dusun), Pertemuan formal dengan masyarakat, Pertemuan informal dengan masyarakat: kunjungan rumah, diskusi kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosial, agama, lapangan)

Hal-hal yang perlu disosialisasikan misalnya: Penjelasan tujuan, manfaat, sasaran Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat (termasuk prinsip non-fisik), Penjelasan kelompok sasaran (pria, wanita, pemuda dan lain-lain), Umpan balik masyarakat terhadap semua aspek di atas. Materi dan media yang dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi

diantaranya: Brosur, Film(video), Poster ,Buku dan lain-lain..

3. Tahap Proses pemberdayaan masyarakat:

a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif

Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Selain itu tahap ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar untuk penyusunan rencana kegiatan pengembangan.

b) Pengembangan kelompok

Pengembangan kelompok dilakukan dengan memfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan bersama. Dalam hal ini perlu diperhatikan keterlibatan perempuan serta yang terabaikan lain. Kegiatan bersama ini dapat berbentuk suatu kelompok yang lengkap dengan kepengurusan dan aturan. Pembentukan berdasarkan kemauan masyarakat dan bisa terjadi pada saat pelaksanaan Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif maupun sesudahnya. Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

c) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan rencana kelompok dimaksudkan agar kelompok dan anggotanya mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan yang konkrit dan realistis. Dasar penyusunan adalah potensi dan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dan tujuan kelompok yang sudah ditentukan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, bukan hanya pengurus, tetapi seluruh anggota kelompok berperan serta.

d) Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif bukanlah suatu kegiatan khusus, tetapi dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap. agar proses Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat di mana intinya adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

e) Tahap Pemandirian Masyarakat
Proses Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dari awal proses sadar bahwa hal ini akan terjadi.

E. Metode penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2010:56). Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat di sekitar Gunung Kemukus yang sudah terkena kebijakan pemerintah yang menutup bisnis prostitusi di sekitar wilayah tersebut. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi data primer yang berupa wawancara dengan informan terkait dengan kegiatan komunikasi pembangunan. Sedangkan untuk observasi non partisipan, peneliti mengamati serta terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Terkait dengan data sekunder, peneliti menggunakan data dokumentasi berupa data dari media massa yang berkaitan dengan

penutupan bisnis prostitusi di wilayah Gunung Kemukus., maupun jurnal-jurnal ilmiah penelitian, maupun buku-buku yang berkaitan dengan komunikasi pembangunan,

Pengumpulan data dilakukan dengan carawawancara mendalam dengan purposive sampling sebagai metode penentuan informannya. Disamping itu, peneliti juga menggunakan obeservasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Untuk menghasilkan penelitian yang valid, maka kali ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Yakni, sebuah teknik yang berorientasi pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat mewakili realitas gejala yang diteliti.

Dari sisi analisis data, peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Sutopo (2006:128).

F. Komunikasi Aspiratif di Gunung Kemukus

Menurut penanggung jawab Lokasi Wisata Gunung Kemukus Marcellus Suparno, intensitas komunikasi melalui program *community development* dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sragen dengan masyarakat dilakukan 1–3 selama kurun waktu sebelum terjadinya penutupan lokasi Gunung Kemukus, dan dalam proses komunikasi musyawarah dilakukan dengan pendapat antara masyarakat dengan pihak Pemkab Sragen guna mendengar aspirasi dari pemerintah guna penyusunan rencana program paska penutupan. Sebagian masyarakat desa tidak dilibatkan, tetapi hanya diwakili oleh kepala kampung dan aparatnya, serta masyarakat peduli Gunung Kemukus.

Komunikasi pembangunan pembangunan yang dilakukan tersebut adalah meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktifitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Dalam hal ini antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam makna sempit komunikasi pembangunan yang dilakukan sesuai pendapat Harun dan Ardianto (2011: 162) adalah segala upaya dan cara, serta teknik

penyampaian gagasan, keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas.

Aktivitas komunikasi publik dengan masyarakat Gunung Kemukus tidak membatasi warga masyarakat, namun demi efektifitas dan efisiensi dialog diwakili oleh kepala kampung dan aparatnya saja tetapi dalam bentuk komunikasi terbuka dengan melibatkan seluruh warga masyarakat kampung, hanya saja proses penyampaiannya tidak disampaikan secara langsung kepada seluruh warga masyarakat, tetapi melalui kepala-kepala kampung dan/atau tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat dengan harapan selanjutnya dapat menyebarkan hasil musyawarah tersebut kepada seluruh warga masyarakat. Hal ini sangat efektif, namun dapat terjadi kesenjangan komunikasi antara Pemkab dengan warga masyarakat. Pemkab menganggap seluruh warga masyarakat telah diundang sedangkan masyarakat menganggap mereka tidak diundang dan hanya diikuti oleh kepala-kepala kampung dan aparatnya saja. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kurang menguntungkan, maka pihak Pemkab melalui Penanggungjawab Lokasi Wisata Gunung Kemukus mengadakan berbagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan sekaligus melakukan komunikasi aspiratif dengan masyarakat melalui berbagai cara secara bertahap, yaitu (*Hoofstede* dalam *Khairuddin*, 2000):

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak Pemkab Sragen (Bapak Marcellus Suparno) menciptakan prakondisi, memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan secara efektif dengan menyediakan sarana dan pra sarana. Dalam hal ini pihak Pemkab menyediakan berbagai peralatan pelatihan berupa mesin jahit, bahan-bahan jahitan, guru/instruktur menjahit, dan lain-lain.

Selain itu juga memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat

dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, melakukan penguatan spiritual maupun sosial, menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah dengan membentuk forum-forum komunikasi yang mengadakan dialog-dialog secara periodik dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa mewakilkan kepada siapapun.

2. Tahap transformasi

Dalam tahapan ini, warga dihadapkan pada kenyataan bahwa bisnis prostitusi adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Dengan pertimbangan ini, maka pemerintah memutuskan untuk menutupnya yang berimplikasi pada hilangnya mata pencaharian warga selama ini. Dengan demikian, tahapan transformasi ini dilakukan dengan memberikan wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga kesejahteraan warga dapat meningkat dengan pekerjaan baru yang diperoleh.

Setelah tahap pertama di atas telah terkondisi. Masyarakat selanjutnya menjalani proses belajar tentang pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini dapat menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang dibutuhkan. Sehingga dalam kurun waktu tertentu sebagian masyarakat mendapatkan penghasilan, semisal menjahit maupun sebagai nelayan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual,

Fase ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat sekitar Gunung Kemukus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kecakapan-keterampilan ini lah yang membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Pada tahap ini masyarakat sekitar Gunung Kemukus diberi kebebasan untuk mengembangkan kemampuan ekonomisnya, melahirkan kreasi-kreasi, dan

melakukan inovasi dalam lingkungannya. Masyarakat secara mandiri melakukan pembangunan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari proses komunikasi melalui program-program pemberdayaan tersebut pemerintah tetap melakukan pendampingan agar masyarakat tersebut tetap terlindungi, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat untuk melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.

G. Pemberdayaan Masyarakat Gunung Kemukus Paska Penutupan Prostitusi

Pada prinsipnya tahapan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara bertahap dan strategis menyesuaikan kearifan lokal. Secara rinci masing-masing tahapan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Seleksi lokasi

Masyarakat di sekitar lokasi makam sudah banyak yang menekuni sektor industri kecil dan menengah termasuk di dalamnya industri kerajinan dan industri rumah tangga, namun paska penutupan lokasi tersebut banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Kemudian pihak Pemkab melakukan *assesment* terhadap masyarakat sekitar Gunung Kemukus untuk sinkronisasi program-program pemerintah guna pemberdayaan paska penutupan lokasi wisata tersebut. Aktivitas komunikasi dalam proses musyawarah penyusunan rencana program pembangunan dilakukan oleh Pemkab Sragen, seperti rencana program pembangunan infrastruktur umum, dan aktivitas komunikasi dalam kegiatan penyuluhan sekaligus melakukan pelatihan kepada masyarakat berupa kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan, pertanian, dan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mampu menyejahterakan diri sendiri

secara ekonomis. Dalam proses komunikasi tersebut, pihak Pemkab Sragen melibatkan kepala kampung dan aparatnya, serta masyarakat peduli Gunung Kemukus sebagai perwakilan seluruh masyarakat.

2. Tahap Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.

Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi: Pertemuan formal dengan Aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat Gunung Kemukus perihal bagaimana mengantisipasi munculnya kembali bisnis prostitusi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah melalui pengelola Kawasan Gunung Kemukus meminta kepada para tokoh agama untuk menjaga kondusivitas pasca penutupan berlangsung.

Tidak hanya itu, dalam pertemuan-pertemuan yang digelar oleh warga juga disampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap hilangnya mata pencaharian warga Gunung Kemukus pasca penutupan bisnis prostitusi melalui pertemuan-pertemuan waerga. Dalam hal ini masyarakat sering terlibat dialog santai dengan aparata dusun, desa maupun pihak pengelola obyek wisata Gunung Kemukus, sehingga terjalin hubungan yang lebih akrab, dan tidak terlihat adanya penghalang dalam melakukan percakapan.

3. Tahap Proses pemberdayaan masyarakat:

a. Kajian keadaan pedesaan partisipatif

Karena latar belakang social masyarakat di sekitar Gunung Kemukus adalah agraris, maka Pemkab Sragen melakukan pemberdayaan dengan melakukan inovasi usaha ekonomis. Bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah, dan sedang dilakukan sekarang adalah usaha menjahit dengan melibatkan masyarakat sebagai penjahit dan pemerintah memberikan bantuan pinjaman mesin jahit. Kemudian usaha pembuatan karamba ikan di

sungai yang mengalir di sekitar lokasi objek Gunung Kemukus dengan didampingi oleh penyuluh perikanan dari dinas terkait Pemkab Sragen.

Sehingga tujuan pembangunan masyarakat yang dirumuskan sebagai suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri ataupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dapat terealisasi. Dimana pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi yang semakin mewujudkan hubungan yang serasi antara kebutuhan (*needs*) dan sumber daya (*resources*) melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk melakukan proses pembangunan (Siti Irene, 2011:56).

b. Pengembangan kelompok

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat di Gunung Kemukus, terjadi dinamika sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan pengetahuan spiritual. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen telah menggulirkan berbagai bantuan baik yang berujud bantuan material maupun non material.

Sebagai realisasi dari bentuk bantuan Pemkab Sragen adalah dengan melakukan pemberdayaan melalui petugas dari dinas terkait untuk melakukan pemberdayaan, pendampingan, dan penyuluhan tentang pembangunan khususnya bidang sosial ekonomi. Penggagas dan pelaksana pemberdayaan tersebut adalah salah satu dari aparat Pemerintah Daerah dengan cara membentuk kelompok tani, kelompok penjahit maupun kelompok nelayan. Pengembangan kelompok juga dilakukan dengan membuat paguyuban ojek, pedagang asongan maupun paguyuban sosial lainnya.

c. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan

Keterlibatan/pelibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Seperti

halnya pelibatan para tokoh masyarakat yang ada di Kemukus ini beberapa kali diajak bertemu oleh Pemkab Sragen melalui penanggungjawab obyek wisata ini untuk menggali aspirasi dari penduduk yang tinggal disini. Pelibatan unsur masyarakat sangat penting guna melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan. Diperhitungkan dalam arti masyarakat setidaknya dipercaya dan diberi tanggungjawab serta dibangkitkan semangatnya, agar turut serta dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah turut serta menyusun, merencanakan, melaksanakan sebab itu turut pula bertanggungjawab.

Salah satu media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah adalah forum Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Dimana dalam forum tersebut pemerintah melakukan pengambilan data aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan lokal wilayah. Pelaksanaan hasil Musrenbang belum dapat maksimal, karena sebagian ada yang dikerjakan oleh para pemborong/pelaksana kontraktor, dengan demikian masyarakat tidak akan dapat terlibat secara langsung dalam menentukan teknis pembangunannya. Jika terlibatpun hanya sebagai tukang/buruh kasar dari pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tersebut. Jadi memang tidak semua proyek hasil Musrenbang dapat “dinikmati” secara optimal oleh masyarakat.

d. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dari pihak pemerintah khususnya Pemkab Sragen dilakukan terprogram melalui dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi-instansi terkait lainnya. Pelibatan dinas sosial ini karena selama ini permasalahan kesejahteraan masyarakat menjadi domain utama Dinas Sosial. Disamping itu, pemerintah Sragen juga melibatkan Dinas Kesehatan dalam rangka memastikan dan mengendalikan angka

warga yang menderita penyakit yang disebabkan oleh kegiatan prostitusi. Evaluasi dilakukan setiap bulan dengan melibatkan pengelola dan warga masyarakat. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memutuskan kebijakan apa yang akan ditentukan untuk periode berikutnya.,

Salah satu program pemberdayaan pemerintah yaitu dilaksanakannya pelatihan menjahit kepada masyarakat Gunung Kemukus, dan hasilnya sampai sekarang dapat dirasakan dengan masih adanya kerjasama dengan pengusaha garment yang memberikan pekerjaan menjahit kepada masyarakat. Meskipun masih berlangsung hasil dari pelatihan menjahit, namun dari segi hasil secara ekonomis masih sangat kurang memadai. Sehingga pelaku/pekerja jahit semakin lama berkurang, ditambah dengan kondisi bahwa sarana menjahit yang diadakan oleh pemerintah diambil/ditarik lagi. Karenanya hanya beberapa orang saja yang mampu untuk membeli mesin jahit dan meneruskan pekerjaan menjahitnya.

e. Tahap Pemandirian Masyarakat

Proses Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dari awal proses sadar bahwa hal ini akan terjadi. Dalam kasus yang terjadi di Gunung Kemukus, peneliti melihat bahwa masyarakat sangat antusias menyambut program yang digulirkan oleh pemerintah. Namun demikian, hasil yang diperoleh belum begitu maksimal. Sehingga kedepannya Pemerintah Kabupaten Sragen harus meninjau ulang program yang selama ini sudah dijalankan apakah benar-benar mambut masyarakat menjadi mandiri.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di lokasi wisata Gunung Kemukus telah berjalan dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari intensitas program dari Pemkab

Sragen yang telah dilakukan dan dijalankan. Program pemberdayaan ini dilaksanakan atas kerja sama antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen, para pemangku wilayah Kecamatan, Desa, Dusun, organisasi kemasyarakatan di wilayah Gunung Kemukus, PSM, relawan, dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat sekitar. Yang pada prinsipnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan yang dapat menentukan masa depannya sendiri.

Dalam melakukan program pemberdayaan, pihak *stake holder*/Pemkab Sragen memaksimalkan tenaga pegawai yang menjadi penanggungjawab lokasi objek wisata Gunung Kemukus yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai aspirator, dinamisator, sekaligus sebagai mediator yang menjembatani aspirasi dari masyarakat maupun eksekutor pelaksana program-program pemberdayaan masyarakat yang meliputi lintas sektoral.

Pasca penutupan, dengan program komunikasi pembangunan yang ada, pemerintah melibatkan masyarakat dalam rangka penyusunan rencana tindak lanjut dan mengurangi potensi tumbuhnya bisnis prostitusi yang serupa. Alhasil, proses yang dimulai dari seleksi lokasi, sosialisasi dan pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik,

Meskipun pemberdayaan masyarakat sudah berjalan cukup baik, namun belum dapat dikatakan berhasil secara maksimal, karena sebagian masyarakat dalam mengikuti program-program tersebut masih setengah hati. Karena masyarakat masih belum sepenuhnya menerima dengan penutupan lokasi wisata tersebut, sebab mereka telah turun temurun berpencaharian dengan cara-cara lama yang sekarang dilarang oleh pemerintah. Sehingga ada beberapa masyarakat masih melakukan pekerjaan-pekerjaan lamanya sebelum dilakukan penutupan lokasi wisata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dilla, Sumadi, Nurbaya, Nunik Siti. 2007. Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Bandung Simbiosis Rekatama Media.

- Harun, Rochajat : Ardianto Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial : Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis. Jakarta : Rajawali Pers.
- Khairuddin. 2000. Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek. Liberty : Yogyakarta
- Melkote, Srinivas R dan H. Leslie Steeves. 2008. Communication for Development in The Third World. New Delhi: Sage Publications India Ltd
- Sastropoetro, R.A. Santoso. 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Soekadijo, R.G. 1996. Anatomi Pariwisata. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Theresia, dr. Aprillia dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta
[Http://www.Sragenkab.go.id](http://www.Sragenkab.go.id)
- Permanasari, Ika Kusuma, 2011, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan, Universitas Indonesia, Jakarta
- WidjajaFitri Novika, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Budaya Di Situs Trowulan Kabupaten Mojokerto*, The 6th UBAYA International Annual Symposium On Management, 14 , Universitas Surabaya, Surabaya